



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SUB UNIT KERJA : UPTD BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN RINJANI TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU AYUB ZAENUDIN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE) DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3. NHK : 522468

II. DATA HARTA

| | | |
|---|------------|----------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 1.347.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000 | | |
| 2. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 240.000.000 | | |
| 3. Tanah dan Bangunan Seluas 488 m2/100 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 122.000.000 | | |
| 4. Tanah Seluas 15000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 765.000.000 | | |
| 5. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 18.000.000 |
| 1. MOTOR, HONDA BEAT NC11B1C Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000 | | |
| 2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 18.350.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 4.812.255 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | 10.000.000 |
| Sub Total | Rp. | 1.398.162.255 |

**III. HUTANG**

Rp. 42.821.874

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.355.340.381

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.